



## PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *e-PLANNING* PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG

Diah Andani

Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Subang  
email : [diah.andani30101992@gmail.com](mailto:diah.andani30101992@gmail.com)

### **Article History :**

Received 2 September 2019  
Received in revised form  
19 December 2019  
Accepted 20 Januari 2020  
Available offline 30 Januari 2020  
Available online 30 Januari 2020

**Language Transcript :**  
Indonesia (ID)

**Key Words :** Perencanaan  
Pembangunan, Sistem  
Informasi, Sirenda, Subang.

**Abstract:** Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk memperoleh gambaran yang diteliti digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah dan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang sesuai dengan prinsip ideal perencanaan dikemukakan partisipatif. Meskipun sejauh ini system digitalisasi telah digunakan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunan itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat. Selain daripada itu transparansi dinilai masih semu. Hal ini disebutkan karena system masih dalam proses pengembangan. Berkesinambungan, bahwa beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik. Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang menampung seluruh ajukan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak dimuat secara langsung

### 1. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik. Pembangunan merupakan proses perubahan kearah yang lebih baik lagi, dan perencanaan berfungsi sebagai alat koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan untuk mencapai tujuan pembangunan. Perencanaan memiliki peran penting dalam proses pembangunan yaitu sebagai arahan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Berawal dari terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Subang berupaya untuk tertib administrasi dan tepat waktu dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

Terbatasnya waktu dan terlalu panjangnya proses penyusunan sesuai permendagri dimaksud membuat Pemerintah Kabupaten Subang melakukan inovasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tanpa mengurangi keakuratan data serta ketepatan waktu yang diberikan membuat pemerintah Daerah Kabupaten Subang memanfaatkan Teknologi dalam Proses Perencanaan Pembangunan yakni aplikasi berbasis komputer yang dinamakan *e-Planning* guna mendukung dan membantu proses penyusunan perencanaan daerah di Kabupaten Subang

Pada tahun 2016 Kabupaten Subang pertama kali menggunakan Aplikasi *e-Planning* dalam proses penyusunan renstra tahun 2016-2021 yang di sahkan oleh Bupati Subang saat itu yakni Hj. Imas Aryumningsih, SE. Dengan aplikasi *e-Planning* diharapkan mampu menghasilkan Renstra yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan selama lima tahun ke depan agar tujuan dan sasaran perangkat daerah akan sesuai dengan yang direncanakan. Namun pada penerapannya hingga saat ini masih di temukan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Transparansi dalam perencanaan pembangunan masih belum benar-benar transparan, sehingga dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dinilai masih minim karena masyarakat tidak dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan.
2. Masih belum optimalnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam perencanaan pembangunan. Usulan-usulan perencanaan pembangunan dilakukan secara manual dan melalui perwakilan dalam bentuk tertulis melalui pemerintahan tingkat bawah. Sehingga Perencanaan

pembangunan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang.

3. Perencanaan pembangunan masih belum terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan masih belum efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang “Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang”

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori perencanaan. Perencanaan itu sendiri berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau sesuatu yang akan direncanakan. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan, jika tujuan tidak tercapai mungkin di sebabkan karena kurang baiknya perencanaan. Artinya bilamana merencanakan dirumuskan secara tidak baik, maka akan berakibat pada tujuan akhir, sebaliknya jika perencanaan dirumuskan dengan baik maka kemungkinan tujuan yang di capai akan baik pula.

Adapun untuk mengukur penelitian ini, penulis menggunakan Prinsip Perencanaan yang ideal menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku Ginanjar Kartasasmita dengan judul **Administrasi Pembangunan**. Dengan 3 prinsip, yakni sebagai berikut :

1. Partisipatif

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau Masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain Masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil (*product*) perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

## 2. Berkesinambungan

Prinsip berkesinambungan menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti tidak pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran (*relapse*). Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

## 3. Holistik

Prinsip holistik menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

## 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian tipe deskriptif adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Guna mendapatkan fenomena yang lebih mendalam, maka digunakan kualitatif.

Jenis dan sumber datanya yakni berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang dapat berupa tanggapan, saran, kritik, pernyataan, dan penilaian dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* di kantor BP4D Kabupaten Subang. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang

bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, melakukan analisis menafsirkan data dan menulis laporan.

Berdasarkan kriteria keabsahan data di atas penulis menggunakan kriteria kepercayaan (*credibility*). Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang dipakai untuk memeriksa validitas data ini adalah pemeriksaan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan.

Data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data skunder akan disusun dan disajikan serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 4. HASIL PEMBAHASAN

Dalam analisis pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang Menggunakan Prinsip Perencanaan menurut Jamshid Garajedagi dan Russel Ackoft (dalam Ginandjar Kartasasmita 1997:52-53) yang terdiri dari tiga prinsip yakni Partisipatif, Berkesinambungan dan Holistik.

Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum sepenuhnya diterapkan, baik proses maupun hasil perencanaan pembangunan itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat, bisa di katakana pula jika transparansi terkait perencanaan pembangunan juga dinilai masih semu meski sistem digitalisasi telah di terapkan. Hal ini bisa dilihat dari akses situs perencanaan pembangunan yang hanya bisa di li diakses oleh operator perangkat daerah saja. Berikut penulis tampilkan tangkapan gambar bapa situs SIRENDA Kabupaten Subang.

**Gambar 4.1** Tampilan Situs Sistem  
Perencanaan Pembangunan Kabupaten  
Subang



Sumber : <http://sirenda.subang.go.id/>

Dari gambar tampilan situs sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang terbukti ketika mengakses situs diharuskan log in terlebih dahulu, dan mereka yang bisa log in hanyalah operator perangkat daerah saja, dimana tiap tiap daerah memiliki 1 operator SIRENDA. Sehingga hal ini di nilai sebagaimana termaksud, bahwa seluruh masyarakat masih belum bisa melihat dengan pasti baik proses maupun hasil daripada perencanaan pembangunan itu sendiri, adapun Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembaaanggunaan sebagai mana selama ini kita ketahui bersama yakni melalui Musrembang.

prinsip berkesinambungan dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik, Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang memantau seluruh ajuan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak Masyarakat tidak dimuat secara langsung dalam situs. Adapun sistem digitalisasi digunakan ketika pengajuan telah di buat kemudian baru di unggah dalam situs SIRENDA, dan tidak semua perangkat daerah melakukan input. Hal ini juga di sebut sebut sebagai kendala lainnya dimana

tidak semua operator perangkat daerah cepat memahami, sehingga pelatihan dan bimbingan teknik diperlukan. Pengajuan tingkat desa adalah siklus perencanaan pembangunan paling awal sebelum pada akhirnya pengajuan sampai di kecamatan, kabupaten hingga di distribusikan kepada Dinas. Dan perangkat desa merupakan sumber aspirasi paling dekat dengan masyarakat, namun kenyataannya bentuk pelatihan terhadap operator perangkat desa setelah penulis telusuri juga disebut sebut belum ada pelatihannya, sehingga sistem perencanaan pembangunan berbasis digitalisasi penulis sebutkan belum benar benar sesuai dengan harapan termaksud.

prinsip holistik dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum baik. Hal ini dikarekankan beberapa kendala tidak bisa di hindarkan seperti masalah jaringan dan komukasi, baik antara BP4D dengan perangkat daerah yang di bawah, maupun perangkat daerah yang di atas. Selain itu segala bentuk pengajuan dengan realisasi terkadang masih terdapat GAP, seharusnya ketika telah berbasis elektronik, maka kesalahan seperti ini tidak lagi di temukan. Hasil daripada perencanaan pembangunan itu sendiri juga masih dalam bentuk tertulis, rencana ajuan masih dalam bentuk format excel.

## 5. SIMPUL DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan penelitian yaitu bahwa perencanaan pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan berbasis *e-Planning* di Kabupaten Subang dinilai belum optimal, hal ini dikarekan meskipun sejauh ini sistem digitalisasi telah digunakan, baik proses maupun

hasil perencanaan pembangunan itu sendiri masih belum benar-benar bisa dilihat oleh masyarakat. Selain daripada itu transparansi dinilai masih semu. Dimana hanya operator tiap tiap perangkat daerah saja yang mampu melihat perencanaan pembangunan itu sendiri.

2. Beberapa usulan masih dalam bentuk tertulis, tidak seluruh pengajuan di ajukan dalam sistem elektronik. Selama ini pemerintah Kabupaten Subang memfasilitasi SIRENDA sebagai situs yang memau seluruh ajukan masyarakat, namun seluruh ide dan aspirasi tidak dimuat secara langsung.
3. Segala bentuk pengajuan dengan realisasi terkadang masih terdapat GAP, seharusnya ketika telah berbasis elektronik, maka kesalahan seperti ini tidak lagi di temukan. Selain daripada itu trouble jaringan dan sulitnya komunikasi dengan operator perangkat daerah dinilai menjadi sorotan penting bagi pemerintah.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di kemukakan sebelumnya, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Diperlukan pengembangan sistem secepatnya agar masyarakat benar-benar bisa melihat proses perencanaan pembangunan, selain daripada itu transparansi harus lebih di tingkatkan lagi guna mengajak Masyarakat Kabupaten Subang untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan yakni dengan membiarkan seluruh masyarakat bisa mengakses situs dan melihat secara jelas proses perencanaan pembangunan.
2. Jika sistem sudah berbasis elektronik sebaiknya segala bentuk pengajuan dilakukan secara digitalisasi sehingga

tidak di perlukan lagi adanya ajuan tertulis yang akan memakan banyak waktu. Selain daripada itu pelatihan untuk seluruh operator perangkat daerah hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga tidak adalagi alasan operator tidak bisa mengoperasikan sistem.

Kendala dari sistem perencanaan pembangunan berbasis manual adalah terdapatnya GAP antara pengajuan dengan realisasi, dengan adanya sistem elektronik seharusnya tidak adalagi kesenjangan antara pengajuan denganrealisasi, jika masih terdapat GAP, dalam hal ini pemerintah harus mengkaji lebih dalam lagi dan segala trouble bisa diminimalisir.

## REFERENSI

- Abiyar, Muharika. 2019. *Metodelogi Penelitian Evaluasi Program*. Bandung : Alfabeta.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Arifin, Zainal. 2019. *Evaluasi Program (Teori dan Praktek Dalam Konteks Pendidikan dan Non Pendidikan)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Baratakusumah, Deddy Supriyadi & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budi, Sutejo. 2002. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Ande Offset.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga : Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rosda.
- Fahmi, Irham. 2018. *Perilaku Organisasi (Teori, Aplikasi, dan Kasus)*. Bandung : Alfabeta.
- Gharajedaghi, Jamshid dan Rusell L. Ackoff. (eds). 1986. *Prologue to National Development Planning*. New York : Greenwood Press.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. *Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

- Indrajit. Richardus. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Kunarjo. 1993. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Lewis, Arthur. 1966. *Perencanaan Pembangunan (Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi)*. Jakarta : Kadar Jaya Offset.
- Moekijat. 1980. *Kamus Management*. Bandung : Penerbit ALUMNI.
- Moch. Nazir. 3003. *Metode Penelitian*. Jakarta :Salemba Empat.
- Moleong. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mulyadi, Tjokrowinoto. 1999. *Konsep Pembangunan Nasional*. Yogyakarta : Liberty.
- Mudrajad, Kuncoro. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Ramli,Rusli. 2014. *Asas-Asas Manajemen*. Banten : Universitas Terbuka
- Ridwan, Nasar Baso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Rukamana, Nana. Steinberg, Florian. Van der hoff, Robert. 1995. *Manajemen pembangunan prasarana perkantoran*. Jakarta : LP3ES.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Baratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta : akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Siagian, Sondang. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Prilaku Administrasi*. Jakarta :P CV Haji Mas.
- Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Radar Jaya`
- Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulbert. 2016. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sjafrizal. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suebu, Barnabas. 2010. *Pembangunan Kampung*. Papua : Pemerintah Provinsi Papua.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sugijanto, Soegijoko. 1997. *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA
- Tarigan, Robbinson.2015. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1993. *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori Dan Penerapan*. Jakarta : LP3ES
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Admisitrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

- Torang, Syamsir.2013. *Organisasi Dan Manajemen*. Bandung : ALFABETA
- Trigunarso, Sri Indra. Mahi, Ali Kabul. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Depok : PT. Kencana
- Ukas, Maman. 2010. *Manajemen :Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung : Agnini
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan* . Bandung : IPDN Press.
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008 tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

<http://www.wikipedia.org.id>

